



LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2021



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho-Nya kami telah menyelesaikan penyusunan "Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021".

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Perwakilan Jawa Tengah pada Tahun 2021, dalam mendukung visi, misi, dan sasaran strategis BPK. Laporan ini merupakan laporan yang menyajikan pencapaian dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam lingkup Perwakilan Jawa Tengah sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

BPK berupaya mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memerhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut, BPK perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memerhatikan isu publik secara strategis, antisipatif, dan responsif. Strategi pemeriksaan BPK bersifat strategis karena akan memerhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana menjadi karakter agenda pembangunan nasional yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dengan memerhatikan unsur tersebut, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada seluruh kementerian/lembaga terkait dengan mengoptimalkan seluruh satker yang dimiliki BPK sesuai dengan kewenangan dan portofolionya masing-masing. Hal ini akan menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Harus diakui bahwa tingkat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2021 masih belum maksimal. Untuk itu diperlukan kerja lebih keras lagi di periode yang akan datang untuk dapat mencapai kinerja maksimal.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dimohonkan maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan ini. Namun demikian, Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan kinerja BPK di masa yang akan datang.

Semarang, 31 Januari 2022

Kepala Perwakilan,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	3
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	5
BAB II Perencanaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	6
Perjanjian Kinerja Tahun 2021	8
Anggaran, Indikator dan Target Kinerja 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	9
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	10
BAB III Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	14
Capaian Kinerja Organisasi	15
BAB IV Penutup	32

Lampiran

- Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah system pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tersebut diperbarui dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) BPK disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2020-2024. Output dari proses pengukuran kinerja BPK adalah LAKIN Eselon II, LAKIN Eselon I dan LAKIN BPK Tahun 2021.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesuai Pasal 543 ayat (1) dan (2) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

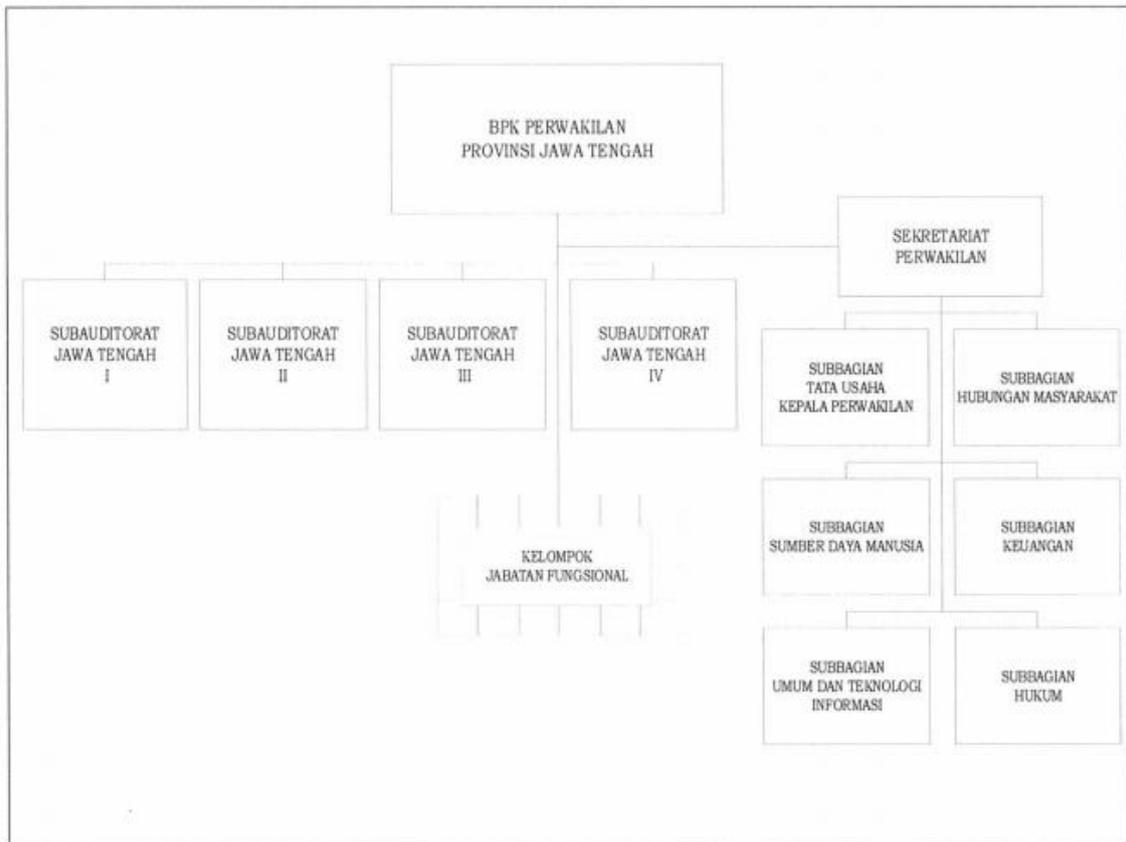
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V dan dipimpin oleh seorang kepala. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Departemen Dalam Negeri, Kementrian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintahan daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN V didukung antara lain oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, khususnya tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi AKN V antara lain dengan merumuskan rencana aksi, kegiatan, dan kebijakan pemeriksaan di Provinsi Jawa Tengah, menyusun program, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, menetapkan tim pemeriksa, memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan, mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, serta mengelola sumber daya manusia, keuangan, hokum, hubungan masyarakat, teknologi informasi sarana dan prasarana, dan administrasi umum di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Perwakilan dan juga mengoperasikan Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA) untuk memantau kinerja Perwakilan dan memberikan kontribusi serta dukungan pada akuntabilitas kinerja BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Gambar 1- Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

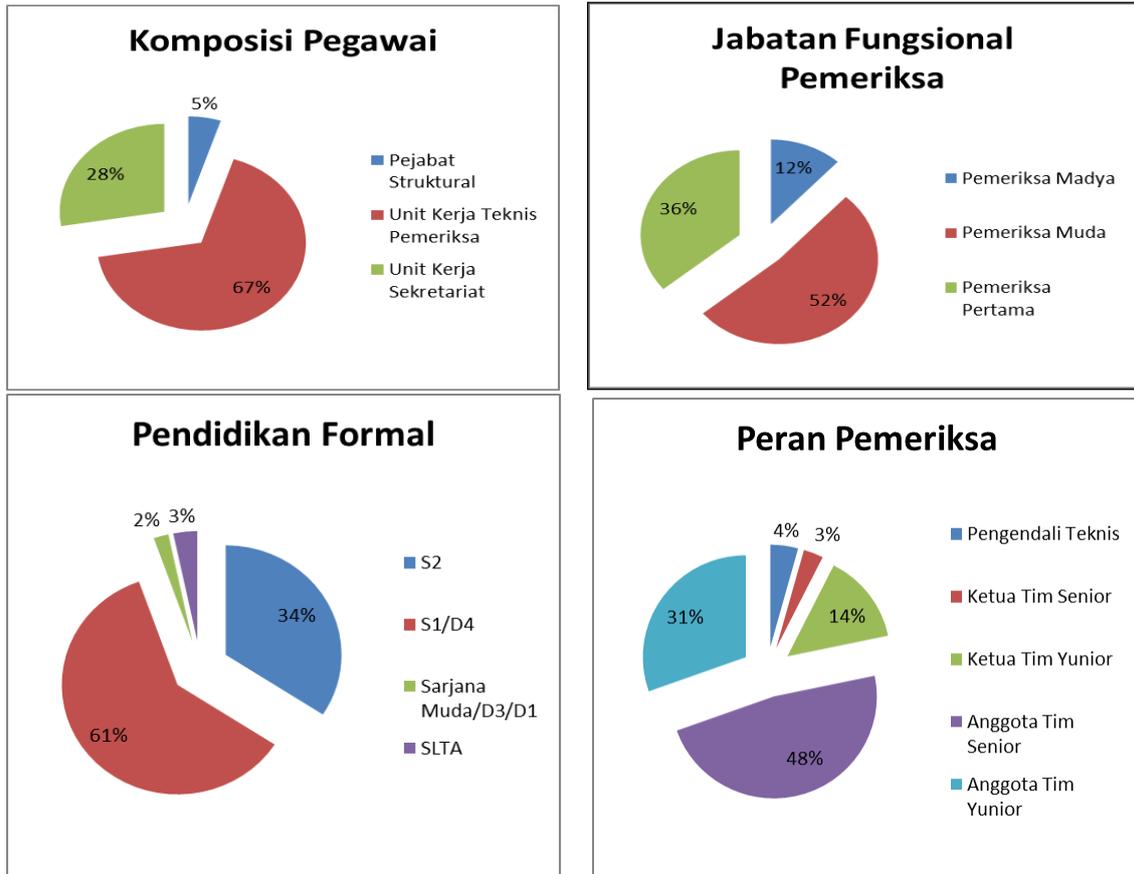
Adapun penjabaran tugas masing-masing Eselon III sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">Sub Auditorat Jateng I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tugas Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi - Lingkup Pemeriksaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas 	<p style="text-align: center;">Sub Auditorat Jateng II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tugas Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi - Lingkup Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas
<p style="text-align: center;">Sub Auditorat Jateng III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tugas Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi - Lingkup Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas 	<p style="text-align: center;">Sub Auditorat Jateng IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tugas Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi - Lingkup Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas
<p style="text-align: center;">Sekretariat Perwakilan</p> <p>Tugas : menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Susunan organisasi : Subbagian SDM, Subbagian Keuangan, Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Hubungan Masyarakat, Subbagian Hukum, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi</p>	

Gambar 2- Penjabaran tugas dan lingkup Eselon III

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada akhir bulan Desember 2021 berjumlah 240 orang yang terdiri dari 12 pejabat struktural dan 161 pejabat fungsional pemeriksa, 66 staf sekretariat serta 30 tenaga kontrak dan honorer.



Gambar 3- Komposisi Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

BPK mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menyesuaikan periode Renstra BPK 2020-2024 dengan perencanaan RPJMN 2020-2024 di mana pada periode Renstra sebelumnya memiliki tenggat waktu satu tahun dengan periode RPJMN. Kebijakan penyesuaian periode ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan periode program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penyusunan Renstra BPK 2020-2024 di samping menyelaraskan periode dengan agenda pemerintah juga dituntut untuk selalu tanggap dan responsif atas isu-isu aktual. Karena itu, Renstra BPK 2020-2024 selain menyesuaikan dengan periode RPJMN juga telah merespons dampak bencana pandemi Covid-19. Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

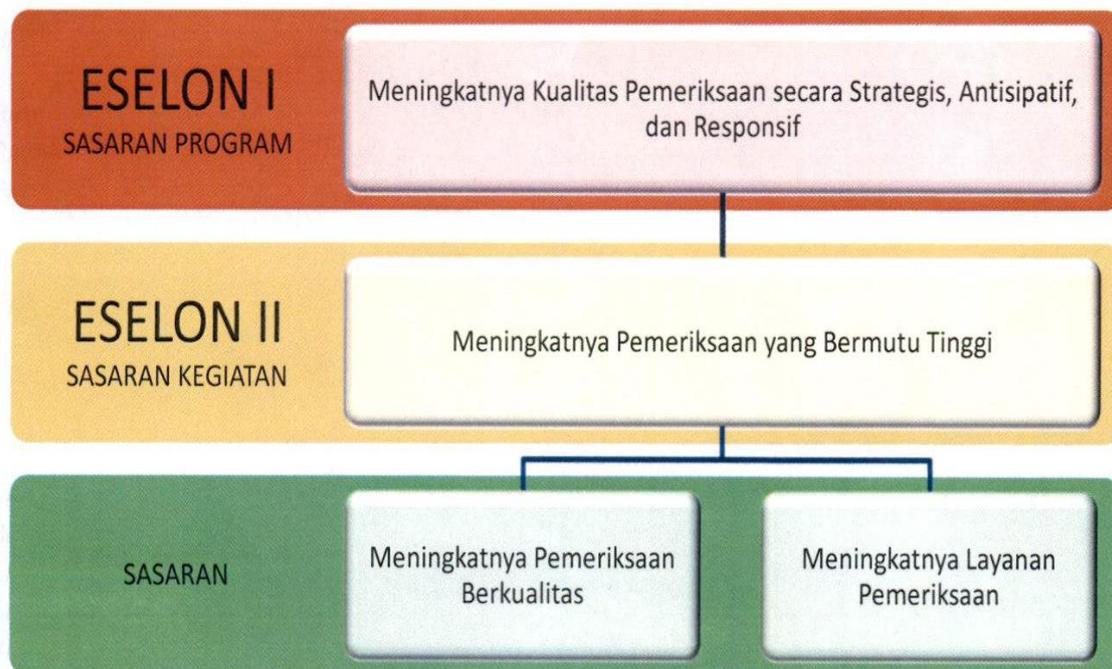
Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, reviu internal dan validasi data capaian kinerja. Data realisasi capaian atas target IKU diinput oleh inputer masing-masing satker secara periodik, yang telah direviu oleh masing-masing manajer dan pimpinan satker. Adapun validasi data capaian kinerja dilaksanakan oleh Direktorat PSMK atas aspek keandalan data yang meliputi ketepatan waktu, kelengkapan dan akurasi data. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan membandingkan capaian masing-masing indikator yang telah divalidasi dengan target triwulan yang terdapat dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja. Sejak Tahun 2018, pelaksanaan pengukuran kinerja menggunakan Aplikasi PRISMA yang dikembangkan Direktorat PSMK bekerja sama dengan Biro Teknologi Informasi. Aplikasi ini dalam tahap pengembangan modul kinerja pegawai dan manajemen risiko.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Direktorat PSMK dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun indikator kinerja dan target kinerja tahun 2021. Indikator kinerja dan

target kinerja ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V).

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen perencanaan kinerja yang berisikan penugasan dari atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan program atau kegiatan. Dokumen PK sekurang-kurangnya menyajikan informasi antara lain pernyataan kesanggupan pegawai, peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target IKU, Program, dan Anggaran, serta Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Dengan demikian, PK merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Badan, Eselon I, dan Eselon II. PK memuat peta strategi, sasaran strategis, IKU beserta targetnya yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Berikut Peta Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



INDIKATOR RINCIAN OUTPUT DAN TARGET TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Rincian Output	Indikator Rincian Output	Target	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	Ketepatan Waktu Penyempurnaan LHP	100%	
	LHP atau Bantuan Keuangan Final Polik	Ketepatan Waktu Penyempurnaan LHP atau Bantuan Keuangan Final Polik	100%	
	LHP oleh RMP untuk KSP untuk dan Akademi BPK	Ketepatan Waktu Penyempurnaan LHP oleh RMP untuk dan Akademi BPK	100%	
	Rahasi Perencanaan Pendapatan	Tingkat Pembatasan Uraian Rahan Pembaca	100%	
	Tumpangtindih	Tingkat Penyediaan Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi KSP	100%	
	Laporan Profil Entitas	Tingkat Keseluruhan Profil Entitas	100%	
	Laporan Pemeriksaan Tidak Lajut Hasil Pemeriksaan	Tingkat Pemutakhiran Data Tidak Lajut Hasil Pemeriksaan	100%	
	Laporan Pemantauan Penyelidikan Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyempurnaan Laporan Pemantauan Penyelidikan Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%	
	LHP	Ketepatan Waktu Penyempurnaan LHP	100%	
	Integrasi/Pendalaman Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perakitan	Integrasi/Pendalaman Ketepatan Waktu Penyempurnaan Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%	
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Manajemen Internal Perakitan	Ketepatan Waktu Penyempurnaan Laporan Manajemen Internal Perakitan	100%
		Layanan Prasarana Internal	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket
Layanan Perekamoran	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	
	Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%	

Indikator	Kriteria	Uraian
Indikator Ketepatan Waktu (Waktu Output)	Maka, waktu untuk menyelesaikan SP/PL, PL, atau Laporan dalam lingkungan 60% Penyempurnaan terbesar 5-10 hari kerja 90% Penyempurnaan terbesar 10-15 hari kerja 95%	1. Perilaku atau kebiasaan secara rutin 2. Perilaku: disiplin atau disiplin/bekerja yang diharapkan kepada orang lain yang dapat diukur secara objektif 3. Perilaku: disiplin atau disiplin/bekerja yang diharapkan kepada orang lain yang dapat diukur secara objektif 4. Perilaku: disiplin atau disiplin/bekerja yang diharapkan kepada orang lain yang dapat diukur secara objektif

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua,
 Dr. Akhsani Khag, MBA., Ak., CFE., CMA., CA., CSFA., CPA., CFA.

Pihak Pertama,
 Ayub-Amali, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp47.261.846.000	1. Pemenuhan Perencanaan dan Pemeliharaan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Rp23.425.530.000	2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Pengguna	100%
	3. Persentase Tidak Lajut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan Rp23.836.336.000	4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pelaksanaan Tematik Nasional	100%
	5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pelaksanaan Tematik Lokal	100%
	7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8. Hasil Evaluasi AEP	A (87,00)
	9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
	10. Tingkat Pemanfaatan Manajemen Pengetahuan	100%
	11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13. Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua,
 Dr. Akhsani Khag, MBA., Ak., CFE., CMA., CA., CSFA., CPA., CFA.

Pihak Pertama,
 Ayub-Amali, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.

Dikerahkan oleh:
 Anggota V,
 Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CPM., CA., CPA., CSFA., CPA., CGCAE.

Wakil Ketua,
 Dr. Agus Fokir Pradono, M. Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFA.

Ketua,
 Dr. Agus Firmansyah, CMA., CSFA., CPA., CGCAE.

Untuk mengukur keberhasilan Renstra BPK Tahun 2020-2024, BPK menggunakan suatu Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) yang merupakan sistem manajemen kinerja yang bekerja secara online serta berfungsi untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengukur pencapaian kinerja dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2020-2024. Dalam pelaksanaannya, sejak Tahun 2018, aplikasi yang digunakan untuk implementasi SIMAK adalah Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA).

Siklus Pengukuran Kinerja Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, reвью internal, dan validasi data capaian kinerja. Data realisasi capaian atas target IKU/IK diinput oleh inputer masing-masing satker secara periodik. Data yang diinput tersebut adalah data yang telah direviu oleh masing-masing manajer dan pimpinan satker.

Adapun validasi data capaian kinerja dilaksanakan oleh Direktorat PSMK atas aspek keandalan data yang meliputi ketepatan waktu, kelengkapan dan akurasi data. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan memperbandingkan capaian masing-masing indikator yang telah divalidasi dengan target triwulan yang terdapat dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja.

INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan , Sasaran dan Anggaran		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Sasaran: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pemeriksaan berkualitas • Meningkatkan layanan pemeriksaan 	Rp47.261.846,00	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		IKU 3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%
		IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%

Sasaran Kegiatan , Sasaran dan Anggaran		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target
		IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
		IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
		IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87,50%

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2021

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Strategi	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	Triwulan I-IV : <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan QC dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh KT, PT dan PJ disetiap penugasan Meningkatkan QA dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Kepala Sub Auditor dan Kepala Perwakilan Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I – IV : <ul style="list-style-type: none"> Mereview Harapan Penugasan pada P2 Pemeriksaan Kinerja dan PDTT Menyetujui P2 dan Surat Tugas Tim Pemeriksaan Mereview Simpulan dalam Konsep LHP Kinerja dan PDTT

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	TW I : • Pengumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I
								TW II : • Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK • Pelaksanaan pembahasan TLRHP Semester I dengan menundang entitas serta pembahasan SIPTL
								TW III : • Pengumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II
								TW IV : • Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK • Pelaksanaan pembahasan TLRHP Semester II dengan menundang entitas serta pembahasan SIPTL
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerjadalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I – II : • Menetapkan tim pemeriksaan tematik nasional
								Triwulan III – IV : • Melaksanakan pemeriksaan tematik nasional
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	TW I : Triwulan I – IV : • Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan • Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan oleh Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I – II : • Merumuskan pemeriksaan tematik lokal yang sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK dan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau menjadi tujuan pembangunan daerah • Menyusun tim Pemeriksaan Tematik Lokal
								Triwulan III – IV : • Melaksanakan pemeriksaan tematik lokal

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	Triwulan I – III : • Sosialisasi atas Visi, Misi dan Nilai Dasar serta Kode Etik dalam Pengarahan Pimpinan maupun rapat - rapat yang dilaksanakan Triwulan IV: • Menginformasikan kepada responden untuk mengisi kuesioner terkait implementasi nilai dasar BPK
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	-	-	-	A (87,00)	Desember	Triwulan IV : Menyusun Laporan Akuntabilitas Perwakilan Tahun 2021
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan								
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	96%	96%	96%	96%	Desember	Triwulan I – IV : Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan fungsi dan tugas setiap pegawai baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%				100%	Desember	Triwulan I – III : Mengidentifikasi penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja selama pemeriksaan yang dapat dijadikan sebagai Best Practice Manajemen Pengetahuan yang akan dilaksanakan : Diklat/ In House Training Pemeriksaan LKPD dan Banpol, In House Training Pemeriksaan Kinerja, In House Training Pemeriksaan PDDT dan Diklat Motivation Skill bagi Pegawai di Penunjang Triwulan IV : Menyusun serta menyampaikan usulan Best Practice kepada Ditama Revbang. Untuk usulan Best Practice yang telah divalidasi dan disahkan, dapat diterapkan implementasinya, serta dilakukan sharing knowledge pada pihak lain.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	Triwulan II :
								Mengirimkan form survey kepuasan kinerja Pemeriksa untuk pemeriksaan LKPD pada semua entitas
								Triwulan IV:
								Mengirimkan form survey kepuasan kinerja Pemeriksa untuk pemeriksaan DTT dan Kinerja pada semua entitas
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	40%	50%	80%	100%	Desember	Triwulan I – IV :
								Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun)
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	Desember	Triwulan I – IV :
								Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan realisasi anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Pengelolaan kinerja BPK dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran atas capaian target yang telah ditetapkan tersebut dilakukan secara berkala melalui Aplikasi PRISMA meliputi proses penginputan, validasi, dan revidi data input.

Pengukuran capaian indikator ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip self assessment dimana data realisasi kinerja diinput oleh masing-masing satker ke dalam Aplikasi PRISMA
2. Terdapat tiga jenis polarisasi indikator (ekspektasi nilai realisasi indikator terhadap nilai targetnya) yaitu:
 - a. maximize - nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target;
 - b. minimize - nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target; dan
 - c. stabilize - nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu
3. Capaian indikator ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengan range sebagai berikut:

<i>Color Range</i>	Deskripsi
	Skor \geq 100
	$80 \geq$ Skor $<$ 100
	Skor $<$ 80

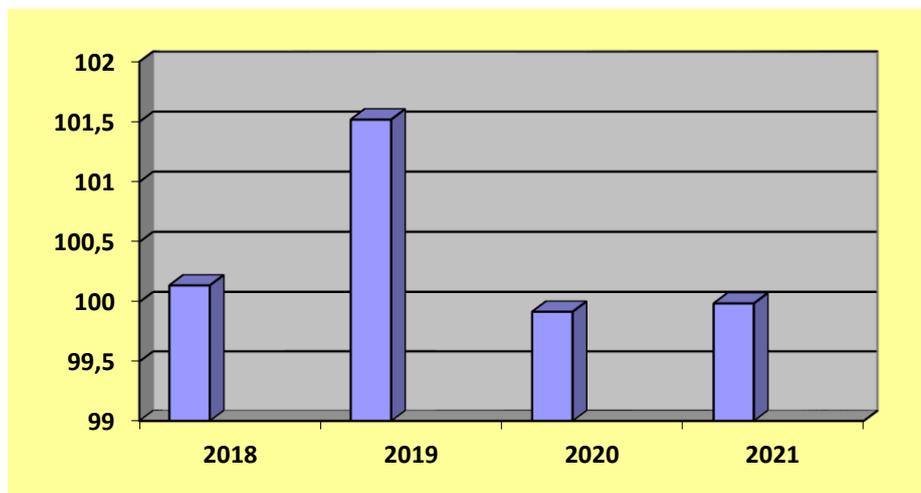
4. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan manual pengukuran yang memuat mengenai definisi, tujuan, formula, bobot, satuan pengukuran, dan polarisasi masing-masing indikator beserta sumber data bukti pendukung dan penanggung jawab atas indikator
5. Validitas data kinerja mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data, dan keakuratan data.

Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target IKU. Skor kinerja Perwakilan Jawa Tengah pada Tahun 2021 sebesar **99,99**. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020

yang memperoleh skor sebesar 99,92. Berikut kami sajikan capaian kinerja Perwakilan Jawa Tengah tahun 2018 s/d 2021 :

CAPAIAN KINERJA 2018 - 2021



Capaian kinerja di tahun 2021 secara umum telah melebihi target, meski demikian masih terdapat tiga target IKU yang belum tercapai, yaitu :

- 1) IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
- 2) IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
- 3) IKU 8 Hasil evaluasi AKIP

Pencapaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan:	Indikator Kinerja IKU		Target	Realisasi	Skor Kinerja
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	86,22%
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00
Sasaran: Meningkatnya Pemeriksaan berkualitas Meningkatnya layanan pemeriksaan Meningkatnya	IKU 3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	87,71%	105,00
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,88%	100,88
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%	100,29%	100,29
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,99%	100,99

	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,43)	88,60
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	86,01	98,86
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	99,18%	103,31
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100,00
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (4,09)	105,00
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100,00
	IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87,50%	91,21%	104,24

Dari tabel di atas dapat diuraikan lebih rinci mengenai pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu:

1. hasil Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC)
2. hasil evaluasi EPP atas LHP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan
3. hasil rewiu Itama terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

Pada Tahun 2021 Perwakilan Jawa Tengah menargetkan nilai capaian sebesar 100%. Target ini konsisten dengan Tahun 2020, yaitu 100%. Adapun perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Perkembangan Capaian IKU 1 periode 2019-2021

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	2019	2020	2021
Target	N/A	100%	100%
Realisasi	N/A	78,47%	86,22%
Skor kinerja	N/A	78,47	86,22

Berdasarkan pengukuran, Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada Tahun 2020 sebesar 86,22%, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 86,22. Ketidaktercapaian target tersebut karena terdapat LHP LKPD yang tidak memenuhi 100% pada evaluasi EPP.

Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, mulai dari komitmen untuk melengkapi dokumen lembar revidi sampai dengan memastikan keakuratan dan konsistensi penyajian pada LHP yang disusun.

Dalam rangka mencapai Strategi 2 - Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif yang keberhasilannya salah satunya diukur melalui indikator ini, upaya efisiensi yang dilakukan oleh Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan). Aplikasi SiAP yang digunakan oleh pemeriksa dalam mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses revidi secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Pengoptimalan aplikasi ini bermanfaat dalam menghemat anggaran biaya perjalanan dinas dan mempermudah pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada Tahun 2021 sebesar 100% sesuai dengan target ditetapkan, yakni 100%. Capaian ini konsisten dengan Tahun 2020. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Capaian IKU 2 periode 2019-2021

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	2019	2020	2021
Target	N/A	100%	100%
Realisasi	N/A	100%	100%
Skor Kinerja	N/A	100	100

Atas capaian IKU tersebut, Perwakilan Jawa Tengah berkomitmen untuk mempertahankan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan.

IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Berdasarkan pengukuran, Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2021 sebesar 87,71% di atas target yang ditetapkan sebesar 75%, sehingga capaiannya sebesar 105.

Capaian tersebut diukur berdasarkan realisasi jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 22.791 rekomendasi ditambah jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 51 rekomendasi, dari total 27.436 rekomendasi yang disampaikan kepada *auditee* selama periode Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2021.

Ketercapaian target tersebut didukung komitmen dan peran aktif Kepala Satker untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta tingkat pemanfaatan teknologi informasi dhi. aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL).

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Capaian IKU 3 periode 2019-2021

IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	2019	2020	2021
Target	N/A	75%	75%
Realisasi	N/A	85,78%	87,71%
Skor Kinerja	N/A	105	105

Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, BPK akan selalu mengupayakan langkah-langkah yang strategis dan simultan dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Dalam rangka mencapai Strategi 2 - Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif yang keberhasilannya salah satunya diukur melalui indikator ini, upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK adalah perubahan metodologi pemantauan TLRHP yang semula secara manual menjadi sistem informasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Aplikasi SIPTL merupakan aplikasi atas pemantauan TLRHP yang dapat diakses oleh entitas yang diperiksa untuk mengunggah dokumen tindak lanjut dan memantau penetapan status tindak lanjut oleh BPK. Aplikasi ini juga digunakan oleh internal BPK untuk validasi dokumen, penelaahan, validasi tindak lanjut dan persetujuan penetapan status TLRHP secara berjenjang. Adanya perubahan metodologi pemantauan ini memberikan manfaat bagi internal BPK dan pihak entitas yang diperiksa. Manfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang, fleksibilitas waktu validasi dan persetujuan status TLRHP secara berjenjang, serta pemantauan TLRHP bersifat realtime. Sedangkan manfaat bagi pihak entitas yang diperiksa berupa efisiensi anggaran terkait perjalanan dinas dan belanja barang, serta fleksibilitas waktu pemantauan status TLRHP.

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Sumber data yang digunakan untuk pengukuran IKU ini adalah LHP Pemeriksaan Tematik dan RKP Pemeriksaan.

Berdasarkan hasil pengukuran, Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan kerja dalam Pemeriksaan tematik Nasional sebesar 100,88% di atas target yang ditetapkan, 100%, sehingga capaian nya sebesar 100,88.

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 Capaian IKU 4 periode 2019-2021

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	2019	2020	2021
Target	N/A	100%	100%
Realisasi	N/A	101,52%	100,88%
Skor Kinerja	N/A	101,52	100,88

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan

IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Sumber data yang digunakan sebagai pengukuran yaitu Surat Permintaan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan, Surat Tugas Pemeriksaan, LHP, dan Surat Keluar Penyampaian LHP.

Berdasarkan hasil pengukuran, Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional sebesar 100,29% di atas target yang ditetapkan, 100%, sehingga capaian nya sebesar 100,29.

Realisasi IKU ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pemeriksaan BPK bersifat responsif atau lebih tanggap dalam menangkap isu strategis dan permintaan pemangku kepentingan. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Capaian IKU 5 periode 2019-2021

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	2019	2020	2021
Target	N/A	100%	100%
Realisasi	N/A	100%	100,29%
Skor Kinerja	N/A	100	100,29

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK adalah mengelola permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan khususnya terkait permintaan Investigasi dalam satu Unit Kerja Eselon I yaitu Auditorat Utama Investigasi (AUI).

Sebelum dibentuk AUI, proses ini dilaksanakan oleh masing-masing satker pemeriksaan pusat dan perwakilan di mana membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama mulai proses persetujuan sampai dengan finalisasi LHP. Setelah dibentuk AUI, pemeriksaan dilaksanakan lebih cepat mulai proses persetujuan sampai dengan finalisasi LHP.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal **satu kali** dalam periode Renstra.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's, dengan sumber data pengukuran LHP Pemeriksaan Tematik dan RKP Pemeriksaan. Berdasarkan pengukuran, Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal sebesar 100,99% di atas target yang ditetapkan 100% sehingga capaiannya sebesar 100,99 dan telah memenuhi target Renstra 2020-2024.

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 Capaian IKU 6 periode 2019-2021

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	2019	2020	2021
Target	N/A	100%	100%
Realisasi	N/A	100%	100,99%
Skor Kinerja	N/A	100	100,99

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Berdasarkan pengukuran, Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK sebesar 4,43 dibawah target yang ditetapkan 5,00 sehingga capaiannya sebesar 88,6. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Capaian IKU 7 periode 2019-2021

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2019	2020	2021
Target	5,00	5,00	5,00
Realisasi	4,86	4,59	4,43
Skor Kinerja	97,20	91,80	88,60

Perkembangan dari tiga tahun terakhir, pemahaman nilai dasar BPK mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan yang dilakukan guna meningkatkan capaian tersebut.

Adapun saran/tanggapan dari responden di antaranya :

- 1) Meningkatkan sosialisasi atas implementasi nilai dasar BPK
- 2) Meningkatkan pengawasan implmentasi nilai dasar kepada seluruh pegawai dan pimpinan di BPK
- 3) Implementasi nila dasar pegawai sudah baik untuk mendukung tercapainya visi dan misi BPK
- 4) Memeberikan reward dan punishmane secara adil terhadap pelaksanaan implementasi nilai dasar
- 5) Memberikan pendampingan implementasi nilai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan
- 6) Meningkatkan implementasi nilai dasar secara konsisten dan berkesinambungan

Berdasarkan masukan dari responden, hal yang perlu ditingkatkan adalah sosialisasi dalam bentuk konkrit dan menarik serta meningkatkan pengawasan implementasi nilai dasar kepada seluruh pegawai dan pimpinan di Perwakilan Jawa Tengah.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK dalam pengukuran indikator ini adalah perubahan metodologi survei yang semula berbasis manual menjadi *digital*. Dengan adanya perubahan ini terjadi efisiensi bagi internal BPK dan pihak *surveyor*. Perubahan ini bermanfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran, responden lebih banyak sehingga survei lebih representatif, dan hasil survei *realtime*. Sedangkan manfaat bagi pihak *surveyor* berupa efisiensi tenaga *surveyor*, pengolahan data survei lebih cepat, dan pemantauan pelaksanaan survei *realtime*.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK

IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Sumber data pengukuran yang digunakan adalah hasil evaluasi AKIP dari Itama. Berdasarkan pengukuran, Hasil Evaluasi AKIP sebesar 86,01 di bawah target yang ditetapkan sebesar 87,00 sehingga capaiannya sebesar 98,86. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 Capaian IKU 8 periode 2019-2021

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	2019	2020	2021
Target	AA	A (86,00)	A (87,00)
Realisasi	AA	A (92,94)	A (86,01)
Skor Kinerja	100,00	105,00	98,86

Atas capaian ini, Perwakilan Jawa Tengah berkomitmen untuk senantiasa melakukan pembenahan dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya serta hasil reuiu dari Itama akan dijadikan sebagai bahan perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Capaian tersebut diukur berdasarkan pemanfaatan layanan dasar (email, edrive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM) dan pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan. Sementara untuk Unit Kerja Pemeriksaan juga termasuk pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiPTL, dan e-audit).

Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh unit kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi sebesar 99,18% diatas target yang ditetapkan 100%, sehingga capaiannya sebesar 103,31. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 Capaian IKU 9 periode 2019-2021

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2019	2020	2021
Target	95,00%	95,00%	96,00%
Realisasi	99,01%	99,18%	99,18%
Skor Kinerja	104,22	104,39	103,31

Ketercapaian atas IKU ini menunjukkan bahwa para pegawai telah memanfaatkan layanan TIK secara optimal yang ditandai dengan tingginya kesadaran pegawai dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Akan tetapi, berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pegawai tersebut perlu terus ditingkatkan, baik dalam hal kualitas layanan TIK sendiri maupun sosialisasi kepada seluruh pegawai sebagai user. Dengan demikian, IKU ini dapat dipenuhi secara menyeluruh pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

IKU ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

- 1) Laporan Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang mencakup:
- 2) Usulan Best Practice
- 3) Laporan atas Penerapan *Best Practice*
- 4) Laporan atas Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi sebesar 99,18% di atas target yang ditetapkan 100%, sehingga capaiannya sebesar 103,31. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Capaian IKU 10 periode 2019-2021

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	2019	2020	2021
Target	N/A	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	150,00%	100,00%
Skor Kinerja	N/A	105,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Penerapan manajemen Pengetahuan selama dua tahun terakhir telah memenuhi target. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun Renstra BPK 2020-2024

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK antara lain pemanfaatan portal intranet BPK untuk mengunggah usulan best practice. Manfaat yang diperoleh adalah penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang serta kemudahan akses bagi satker yang akan mereplikasi *best practice*.

Peningkatan capaian akan semakin baik jika didorong dengan pelaksanaan kegiatan rutin dan strategis antara lain.

- 1) Peningkatan pemahaman atas knowledge management dan best practice;
- 2) Sistem rewarding atas usulan Best Practice dari satker yang terpilih menjadi *Best Practice* level BPK Wide secara lebih memadai;
- 3) Sosialisasi berkelanjutan melalui berbagai kegiatan terkait *knowledge management* dan *best practice* yang melibatkan satker di lingkungan BPK;
- 4) Penentuan prioritas kegiatan terkait pembangunan portal knowledge management terutama dalam hal kebutuhan penyempurnaan pembangunan portal sebagai sarana/media best practice sharing.

Pengelola dan pihak-pihak terkait pelaksanaan IS Best Practice Sharing diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan best practice sesuai dengan Roadmap Implementasi Manajemen Pengetahuan BPK yang telah disusun, sehingga pelaksanaan best practice di BPK dapat terimplementasi secara menyeluruh.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

IKU ini ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan BPK atas kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh satker terkait di BPK. IKU ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (dhi. Biro Humas dan KSI) dan seluruh Kantor BPK Perwakilan (dhi. Subbag. Humas).

Capaian Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi diukur melalui survei oleh lembaga independen yang dilaksanakan secara tahunan, dengan sasaran responden eksternal yaitu mitra domestik (IAI, KAP, Perguruan Tinggi, dan media massa), *auditee*, lembaga perwakilan, Instansi Penegak Hukum (IPH) termasuk responden internal yaitu pegawai BPK yang memanfaatkan layanan perpustakaan BPK, baik di kantor pusat maupun di kantor BPK Perwakilan wilayah barat dan timur.

Pengukuran dilakukan menggunakan skala sebagai berikut:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Berdasarkan pengukuran, realisasi Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada Tahun 2020 sebesar 4,09 di atas target yang ditetapkan yaitu 3,80 sehingga capaian IKU ini sebesar 105. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Capaian IKU 10 periode 2019-2021

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	2019	2020	2021
Target	N/A	3,80	3,80
Realisasi	N/A	3,94	4,09
Skor Kinerja	N/A	103,68	105,00

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK dalam pengukuran indikator ini adalah perubahan metodologi survei yang semula berbasis manual menjadi *digital*. Dengan adanya perubahan ini terjadi efisiensi bagi internal BPK dan pihak *surveyor*. Perubahan ini bermanfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran, responden lebih banyak sehingga survei lebih representatif, dan hasil survei *realtime*. Sedangkan manfaat bagi pihak *surveyor* berupa efisiensi tenaga *surveyor*, pengolahan data survei lebih cepat, dan pemantauan pelaksanaan survei *realtime*.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU ini bertujuan bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tuisi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK

Selama Tahun 2020, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara, antara lain melalui pengalihan sebagian besar pelaksanaan diklat dari klasikal menjadi daring (online) melalui e-learning dan Learning Management System (LMS) sebagai usaha menghadapi pandemi COVID-19, memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kediklatan baik dari kualitas layanan sarana prasarana, fasilitator maupun media pembelajaran.

Selain itu juga dilakukan penguatan komitmen dalam menjalin kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat, sertifikasi dan akreditasi dengan para mitra kerja sama. Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam menghadapi pandemi COVID-19, di antaranya dengan mengalihkan sebagian besar pelaksanaan diklat dari klasikal menjadi daring (online) melalui e-learning dan Learning Management System (LMS). Manfaat pelaksanaan diklat secara daring (online) antara lain penghematan anggaran untuk perjalanan dinas, belanja barang, penggunaan SDM, dan efisiensi waktu.

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014)

2. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa

- *Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September.*
- *Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.*

Berdasarkan pengukuran, Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi tahun 2021 adalah sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan 100% sehingga capaiannya sebesar 100,00. Secara rinci perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Capaian IKU 12 periode 2019-2021

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	2019	2020	2021
Target	N/A	100%	100%
Realisasi	N/A	97,35%	100%
Skor Kinerja	N/A	97,35	100,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU pada tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya. Ketercapaian ini tidak lepas dari pemanfaatan TI dan sarpras dalam menghadapi pandemi COVID-19, di antaranya dengan mengalihkan sebagian besar pelaksanaan diklat dari klasikal menjadi daring (online) melalui e-learning dan Learning Management System (LMS).

IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut

Indikator Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran mengukur tingkat kinerja anggaran dari aspek implementasi. Capaian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran tersebut diukur berdasarkan empat indikator yaitu penyerapan anggaran, pencapaian keluaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, serta efisiensi.

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran adalah sebesar 91,21% atau di atas dari target yang telah ditetapkan sebesar 87,50% sehingga capaiannya sebesar 104,24.

Secara rinci perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Capaian IKU 13 periode 2019-2021

IKU 13 Tingkat Implementasi Kinerja Anggaran	2019	2020	2021
Target	N/A	87,00%	87,50%
Realisasi	N/A	92,26%	91,21%
Skor Kinerja	N/A	105,00	104,24

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja telah dilakukan secara optimal di seluruh unit kerja. Akan tetapi, upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran terkait penganggaran berbasis kinerja ini tetap perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari pimpinan unit kerja sampai dengan pelaksana.

Dengan sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan IKU ini dapat terpenuhi oleh seluruh unit kerja pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024.

Tercapainya target karena BPK telah memiliki hal-hal sebagai berikut.

- Komitmen bersama dari satker untuk selalu berusaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- Penyelenggaraan Forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (For-Jala) setiap triwulan. Forum ini bertujuan antara lain menyampaikan perkembangan kebijakan penganggaran dan implementasinya, mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran dan mencari solusi atas permasalahan yang ada; dan
- Pengelolaan manajemen kinerja atas aspek implementasi Satuan Kerja yang menjadi bagian penilaian indikator kinerja keluaran.

Untuk mempertahankan capaian kinerja anggaran ini, BPK telah menyusun rencana aksi sebagai berikut:

- Mempertahankan capaian kinerja anggaran Satuan Kerja yang berkategori “baik” dan “sangat baik” dan memperhatikan Satuan Kerja yang nilai kinerja anggarannya dalam kategori “cukup”, “kurang”, dan “sangat kurang”.

- b. Meningkatkan capaian keluaran dan indikator kinerja keluaran yang berkontribusi terhadap kinerja anggaran.
- c. Melakukan penajaman kegiatan prioritas, efisiensi, dan optimalisasi terhadap pagu anggaran yang ada pada DIPA/POK Satuan Kerja.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bentuk pertanggungjawaban untuk memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja tingkat organisasi dan seluruh unit kerja yang telah mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara lain melalui identifikasi risiko yang menghambat pencapaian target kinerja dan upaya penanganannya. Pelaksanaan manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan rutin dan strategis untuk mendukung keberhasilan dan mengatasi hambatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang dioperasionalisasikan melalui pengukuran kinerja atas target yang ditetapkan dalam PK Tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen PK Tahun 2021, pencapaian skor kinerja BPK pada periode Tahun 2021 adalah **99,99** yang berarti naik dari periode Tahun 2020 sebesar 99,92. Namun demikian masih terdapat beberapa IKU yang belum tercapai, yaitu:

- 1) IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- 2) IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
- 3) IKU 8 Hasil evaluasi AKIP.

Dalam upaya menindaklanjuti IKU yang masih belum mencapai target, Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak hentinya melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja saat ini. Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain penyempurnaan aplikasi pengukuran kinerja, meningkatkan kompetensi SDM pengelola kinerja, dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja guna pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK

Semarang, 31 Januari 2022

Manajer IKU

Mengetahui ,
Kepala Perwakilan



Bagus Kurniawan
NIP. 197710131999111001

SKOR KINERJA APLIKASI PRISMA TAHUN 2021

[Input Data Terkunci](#)

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

PERIODE: DES / TW 4 / SEM 2 / TAHUN / 2021

Perjanjian Kinerja / Peta Strategi Detail Scorecard Indikator Kinerja Keluaran (IKK)

Expand Refresh Calculate Export

Edit Detail & Dokumen

Nama	Jenis	Periode	Target PK	Target	Realisasi	Score
↳ BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Scorecard	Triwulan...				99.99 ●
↳ Sasaran Kegiatan. Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Sasaran Strategis	Triwulan...				99.99 ●
↳ IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	86,22 %	86.22 ●
↳ IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
↳ IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	75,00%	75,00%	87,71 %	105 ●
↳ IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,88 %	100.88 ●
↳ IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,29 %	100.29 ●
↳ IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,99 %	100.99 ●
IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	IKU	Tahunan	5,00	5,00	4,43	88.6 ●
IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP	IKU	Triwulan...	87,00	87,00	86,01	98.86 ●
↳ IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	IKU	Triwulan...	96,00%	96,00%	99,18 %	103.31 ●
↳ IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	IKU	Tahunan	3,80	3,80	4,09	105 ●
↳ IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
↳ IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran	IKU	Triwulan...	87,50%	87,50%	91,21 %	104.24 ●